



Yusuf Wibisono

### PESAN IDEAS UNTUK BACAPRES

## IKN Tak Layat Dilanjutkan

Jakarta, MIMBAR - Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono SE, ME, mengingatkan para bacapres dan bacawapres soal pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.

Saat ini ada tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan ikut Pemilu 2024.

Menurut pengajar ekonomi UI Jakarta itu, melanjutkan proyek pembangunan IKN akan memberi beban berat pada APBN

■ Bersambung ke Hal 11

## DESAKAN PEMBATALAN PENDAFTARAN PRABOWO-GIBRAN MEREBAK

# KPU Digugat Rp70,5 T

Jakarta, MIMBAR - Seorang akademisi menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menerima berkas pendaftaran pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Dalam gugatannya, Dr Demas Brian Wicaksono SH, MH (35), menuntut KPU membayar kerugian materil senilai Rp70,5 triliun.

Kata salah seorang kader PDIP itu di PN Jakpus, Senin (30/10), "Kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KPU, dikarenakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu menerima berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu (25/10)."



Menurut akademisi kelahiran Situbondo, Jawa Timur, itu, perbuatan yang dilakukan KPU tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur syarat batas usia paling rendah capres dan cawapres adalah minimal berusia 40 tahun. Sedangkan pada saat pendaftaran Prabowo dan Gibran, usia Gibran masih 36 tahun.

■ Bersambung ke Hal 11

## RI Kutuk Serangan Israel ke Gaza

Medan, MIMBAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia sangat marah dengan situasi di Jalur Gaza Palestina yang semakin memburuk sejak sepekan terakhir.

Jokowi menyatakan RI mengutuk serangan yang terjadi di Gaza oleh Israel.

"Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza," kata Jokowi dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden hari ini, Senin (30/10).

Dalam pernyataan tersebut Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia terus mengikuti secara dekat perkembangan



Presiden Joko Widodo. (Foto int)

yang terjadi di Gaza. Jokowi menyatakan RI mengutuk keras serangan acak di Gaza.

"Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza," tegasnya.

Untuk itu Indonesia mende-

sak agar kekerasan di Gaza segera dihentikan,

■ Bersambung ke Hal 11

## Para Ketum Parpol 'Tersandera' Penguasa

Jakarta, MIMBAR - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang saat menyinggung pencalonan putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.



■ Bersambung ke Hal 11



WARGA GAZA CUCI PAKAIAN DAN MANDI PAKAI AIR LAUT : Lembaga PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) terus menyampaikan kepada dunia bahwa kebutuhan esensial di Gaza mulai habis. Seperti diketahui, Israel menerapkan blokade penuh ke Gaza sejak perang dengan Hamas dimulai. Air bersih kini menjadi sumber krisis baru. UNRWA khawatir rakyat bakal meninggal karena tak ada air.

### Jadwal Salat

16 RABIUL AKHIR 1445 H

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Subuh : 04:53 WIB | Maghrib : 18:11 WIB           |
| Zuhur : 12:12 WIB | Isya : 19:22 WIB              |
| Ashar : 15:31 WIB | ■ Untuk kota Medan sekitarnya |

## Hidayah Makan Bersama

Oleh Dr A Rasyid, MA



MAKAN bersama ternyata memiliki manfaat yang besar, setidaknya dapat membangun silaturahmi yang kokoh di antara satu dengan yang lain. Selain itu boleh jadi momen yang pas melakukan lobi-lobi.

Di masyarakat Indonesia tidak jarang juga senang melakukan makan bersama dengan mengundang teman satu profesi atau beda profesi, satu partai atau beda partai.

Tentu saja sangat membanggakan ketika para politikus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar melakukan makan bersama, karena akan

■ Bersambung ke Hal 11

## Buntut Keputusan Batas Usia Capres-Cawapres

### Hakim MK Minta Direshuffle

Jakarta, MIMBAR - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mewacanakan agar sembilan hakim konstitusi termasuk dirinya di-reshuffle. Hal ini buntut putusan MK terkait syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

Arief mengatakan ide itu muncul dalam benaknya lantaran ia merasa buntu dalam menentukan upaya untuk menjaga kehormatan dan harga diri MK.

"Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini mengatakan seperti kok Mahkamah Konstitusi sembilan-sembilan hakimnya kok harus di-reshuffle. Sampai pada titik itu. Karena kebuntuan saya, bagaimana harus menjaga muruah ini. Dalam hati saya mengatakan itu," kata Arief Hidayat dalam keterangannya, Senin (30/10).

Arief menyampaikan salah satu alasan munculnya ide itu adalah kekhawatiran MK tidak

bisa mengaruhi berbagai kritikan atas putusan terakhir yang ramai diperbincangkan publik.

"Apa iya ya, kita mampu pulih, kalau tidak mampu pulih, apa kita memang bersembilan memang harus di-reshuffle," ucapnya.

Kendati demikian, Arief menyerahkan keputusan gagasan itu kepada publik.

Menurutnya, jika masyarakat menginginkan hal itu sebagai solusi atas berbagai problematika bangsa terkini, maka Arief siap dan berharap delapan hakim MK lainnya melakukan hal serupa.

■ Bersambung ke Hal 11



ARIEF HIDAYAT



Amien Rais:

## Dinasti Politik Puncak Khianat Reformasi

Jakarta, MIMBAR - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Jokowi. Ia menganggap tindakan Jokowi sebagai pengkhianatan yang besar.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Merasa bersalah...  
■ Ckckckk...

## Demo 9 Tahun Jokowi

**Makassar, MIMBAR** - Sejumlah mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar demo 9 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menutup jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Imbas demo tersebut lalu lintas mengalami macet parah.

Mahasiswa memblokir Jalan Sultan Alauddin dengan menahan mobil truk yang melintas di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Mereka juga membakar ban bekas.

"Kita evaluasi 9 tahun masa kepe-

mpinan Presiden Joko Widodo. Kami menuntut tegakkan hukum HAM, berantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tegakkan supremasi hukum di Indonesia," kata koordinator aksi, Abdi Gunawan, Senin (30/10).

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang tadi telah mengakibatkan kemacetan

panjang Jalan Sultan Alauddin. Menjelang pukul 18.00 WITA, mahasiswa masih memblokir jalan dengan menahan mobil truk yang digunakan sebagai mimbar orasi.

Sejumlah pengendara yang merasa jengkel dengan aksi memblokir jalan tersebut berteriak dan memaki mahasiswa untuk segera membukakan jalan.

"Kami mau pulang, bukan jalannya. Ini jalan bukan punya nenek moyang kalian," kata salah satu pengendara sepeda motor.

Massa sempat mengejar pengendara sepeda motor tersebut. Aksi mahasiswa tersebut juga mendapatkan pengawasan dari sejumlah polisi yang bersiaga di pinggir jalan. **(cnni/js)**

## IKN Tak ...

**Dari Halaman 1**

(anggaran pendapatan dan belanja negara).

"Sehingga akan mempersempit ruang gerak presiden terpilih mewujudkan program-program yang mereka janjikan," ujar dia, Senin (30/10).

Ia mengaku sudah mengingatkan sejak awal, bahwa IKN ini sangat tidak layak secara finansial. Namun pemerintahan Presiden Jokowi tetap melaksanakan proyek bernilai hampir Rp500 triliun tersebut.

Sejak awal, minat investor ke IKN diyakininya akan minim. Sehingga jika dipaksakan, pendanaan pembangunannya bisa bergantung pada APBN.

"Sejak awal gagasan IKN diluncurkan, kami telah meragukan klaim pemerintah akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN," tutur Yusuf.

**BASA-BASI POLITIK**

Janji-janji investasi ke IKN ini, terlihat lebih banyak sebagai basa-basi politik investor kepada pemerintah. Atau, sekadar menjaga hubungan baik sekaligus memelihara kepentingan investor yang sudah ada.

Ia pun mengkritisi soal pengesahan Undang-Undang IKN pada Januari 2022, yang dibahas secepat kilat, hanya dalam waktu 43 hari saja. "Alih-alih menarik minat investor baru, calon investor yang sudah ada bahkan malah mundur seperti Softbank yang mundur pada Maret 2022,"

**Dari Halaman 1**

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi ini menuturkan, "PKPU No. 19 Tahun 2023..... saat ini masih berlaku mengikat, dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU."

Alumni S1 dan S2 Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta S3 Unibraw Malang itu pun mendesak Majelis Hakim PN Jakpus menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu, menghukum tergugat membatalkan pendaftaran bacapres Prabowo (turut tergugat II) dan cawapres Gibran (turut tergugat III) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.

"Kami juga menggugat agar KPU mengganti kerugian sebesar Rp70 triliun. Immateriil: Rp100 (seratus rupiah)," ungkapnya.

**ENTIKAN SEMENTARA**

Terakhir, Brian mendesak KPU menghentikan sementara proses tahapan pencalonan bacapres Prabowo dan Gibran, sampai putusan akhir mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Bahwa selain KPU sebagai tergugat, kami juga memasukkan Bawaslu, Prabowo, dan Gibran, masing-masing sebagai turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III. Sehingga kami berharap kesemuanya dapat patuh dan tunduk pada dalam putusan yang nantinya dijatuhkan

Majelis Hakim," tandasnya.

**Dari Halaman 1**

Menurut Hasto, kondisi yang membuat Gibran menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Ahad (29/10).

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang men-

gatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," imbuhnya.

Dalam keterangan persnya itu, Hasto mengatakan PDIP telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Jokowi, namun kini ditinggalkan. PDIP, lanjut Hasto, saat ini dalam suasana sedih.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ucap dia.

"Belum ada panggilannya, bahan gugatannya belum ada. Nanti kalau ada kita pelajari, terus kemudian bagaimana menghadapi itu. Sekarang belum bisa komentar," ujar dia.

Sebelumnya diketahui, sekumpulan orang yang mengatasnamakan Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti KKN menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menerima pendaftaran capres Prabowo Subianto meski usia cawapresnya Gibran Rakabuming Raka belum mencapai 40 tahun. Mereka menggugat KPU dengan angka materiil Rp

## KPU Digugat...

**Dari Halaman 1**

**PASTIKAN KEHADIRAN**

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menanggapi ihwal gugatan Rp 70,5 triliun akibat diterimanya pendaftaran capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia belum mau berkomentar banyak, namun mengakui akan hadir jika ada pemanggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kalau nanti sudah ada panggilan sidang kita hadir di sidangnya," kata Hasyim kepada wartawan usai acara pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Hasyim mengaku belum tahu secara detail mengenai gugatan itu. Dia menyebut akan mempelajari isi gugatan jika memang sudah ada panggilan dari pengadilan.

"Belum ada panggilannya, bahan gugatannya belum ada. Nanti kalau ada kita pelajari, terus kemudian bagaimana menghadapi itu. Sekarang belum bisa komentar," ujar dia.

Sebelumnya diketahui, sekumpulan orang yang mengatasnamakan Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti KKN menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menerima pendaftaran capres Prabowo Subianto meski usia cawapresnya Gibran Rakabuming Raka belum mencapai 40 tahun. Mereka menggugat KPU dengan angka materiil Rp

## Para Ketum...

**Dari Halaman 1**

Menurut Hasto, kondisi yang membuat Gibran menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Ahad (29/10).

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang men-

gatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," imbuhnya.

Dalam keterangan persnya itu, Hasto mengatakan PDIP telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Jokowi, namun kini ditinggalkan. PDIP, lanjut Hasto, saat ini dalam suasana sedih.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ucap dia.

## Hakim MK ...

**Dari Halaman 1**

"Kalau ini keinginan Bangsa Indonesia untuk me-resuffle, bagi saya ya saya kira enggak apa-apa. Karena kecintaan kepada bangsa dan negara ini untuk melanjutkan pembangunan pembangunan yang sudah dilakukan selama ini," ujar Arief.

Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu mengingatkan sejarah lahirnya MK 20 tahun lalu, yakni sebagai anak kandung reformasi. Menurutnya, reformasi mengamankan Indonesia Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Itu anak kandung dari reformasi yang mencoba menjadi penafsir konstitusi dalam rangka menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini harus diberantas, ini tidak boleh lagi hidup di Indonesia. Tapi kok ini ada kecenderungan ke situ," ujarnya.

Sebelumnya, Arief Hidayat menyebut kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Menurutnya, kekuatan saat ini terpusat pada segelintir orang. Ia pun membandingkan kondisi saat ini dengan rezim Presiden Sukarno dan Soeharto.

"Bayangkan, di era Soeharto, di era rezim orde lama atau orde baru sekalipun itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu," kata Arief di acara Badan Pembina Hukum

Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Rabu, (25/10).

Arief menyebut trias politica dalam negara demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif dikuasai segelintir orang. Selain itu, perpanjangan tangan kekuasaan juga ditanam untuk menguasai media massa hingga partai politik.

**MKMK Mulai Bertemu Hakim Konstitusi** Sementara, di tempat terpisah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mulai bertemu dengan 9 hakim konstitusi secara tertutup, Senin (30/10) kemarin.

Pertemuan merupakan langkah awal penguatan laporan masyarakat terkait keputusan MK yang membolehkan kepala daerah belum genap berusia 40 tahun, ikut Pilpres 2024.

Kesembilan hakim konstitusi meliputi: Prof Dr Anwar Usmans SH, MH (ketua); Prof Dr Saldi Isra, SH (wakil); Prof Dr Arief Hidayat SH, MS; Prof Dr M Guntur Hamzah .H, MH; dan Dr Manahan

Malonting Pardamean Sitompul SH, M Hum. Kemudian Dr Daniel Yusmic Pancastaki Foekh SH, MH; Prof Dr Enny Nurbaningsih SH, MHUM; Dr Suhartoyo SH, MH; dan Dr Wahiduddin Adams,

patkan dukungan dari kepala negara dan jejaring elite ekonomi politik yang ada.

"Lantas apa urgensinya? Urgensinya, pertama adalah urgensi elektoral," kata Ronny.

Bagi capres-cawapres yang ingin mendapatkan limpaan ceruk suara pilih Jokowi, mendukung dan melanjutkan IKN salah satu "keyword" atau kata kunci untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dan pendukung visi misi Jokowi. Pesannya kepada pemilih Jokowi, memilih capres-cawapres pendukung IKN identik dengan memilih Jokowi.

Kedua, bagi pasangan capres-cawapres yang tidak terlalu identik dengan Jokowi, memiliki urgensi penghindaran atas tekanan politik dari pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa saat ini.

"Sebut saja misalnya, Anies-Imin, yang hanya memberikan dukungan secara normatif, yakni hanya dalam rangka menjalankan Undang-Undang IKN," tutur Ronny.

Bagaimana pun, presiden sedang berkuasa dan memilih legasi IKN. Sekali pun sudah dalam status "lame duck" (bebek lumpuh), masih bisa menggunakan wewenangnya serta pengaruhnya untuk melakukan tekanan kepada capres-cawapres yang dianggap "melawan" kekuasaan.

Ditambah lagi, saat ini tendensi dukungan politik Jokowi sudah sangat jelas.

"Sehingga status lame duck-nya tidak membuatnya kehilangan gairah dan spirit untuk aktif memengaruhi proses politik yang ada," ucap Ronny. **(tem/cp/js)**

70,5 triliun.

"Kami kuasa hukum dari (penggugat) Dr Demas Brian Wicaksono, hari ini kami mengajukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dikarenakan telah menerima pendaftaran bacapres cawapres Prabowo-Gibran," kata kuasa hukum penggugat, Anang Suindro kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Anang menjelaskan, perbuatan melawan hukum itu terjadi pada 25 Oktober 2023, tepat saat Prabowo-Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dia menyebut peristiwa itu melanggar hukum yang berlaku dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Kami melihat peristiwa yang dilakukan KPU yaitu menerima pendaftaran itu melanggar PKPU Pasal 13 ayat 1 huruf i yang di situ masih mensyaratkan usia capres-cawaprws 40 tahun. Belum ada perubahan, KPU belum melakukan perubahan terkait PKPU," jelas dia.

Anang menuturkan, dengan belum adanya perubahan PKPU, seharusnya KPU tunduk pada PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Capres-Cawapres. "Kami menilai perbuatan yang dilakukan KPU itu adalah perbuatan melawan hukum, maka kami menggugat KPU yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia dan dalam gugatan kami meminta KPU untuk dihukum, salah satunya membayar kerugian materi Rp 70,5 triliun," ungkap dia. **(bes/cp/js)**

Hasto turut menyinggung kerja keras simpatisan, anggota dan kader partai dalam lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir. Menurut dia, hal tersebut merupakan wujud rasa sayang kepada Jokowi.

"Namun, apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifulah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.

Ia menutup keterangan persnya dengan harapan awan gelap demokrasi yang terjadi saat ini dapat segera berlalu.

"Dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," pungkasnya. **(cnni/js)**

SH, MA (ikut dipilih menjadi salah seorang anggota MKMK). Seluruhnya, tanpa kecuali, dilaporkan masyarakat ke MKMK.

Menurut jurubicara MK, Fajar Laksono, pertemuan MKMK dengan seluruh hakim konstitusi tersebut belumlah forum sidang, meski agendanya tertutup.

Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshidiqie mengatakan, pihaknya sedang menyusun mekanisme pemeriksaan terhadap para hakim konstitusi. Sebelum pemeriksaan, MKMK akan menggelar pertemuan dengan para hakim konstitusi untuk menyampaikan mekanisme pemeriksaan tersebut.

"Jadwalnya lagi disusun, ada yang ramai-ramai beresmbilan, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang lima orang, sendiri-sendiri, tergantung kasus laporannya," kata Jimly, Kamis (26/10).

Ia juga mengatakan, sembilan hakim konstitusi nantinya diperiksa secara tertutup, sesuai peraturan internal MK, dan juga untuk menjaga kehormatan hakim.

MKMK diberi mandat untuk menyelesaikan masalah etik hakim konstitusi yang digugat masyarakat dalam waktu hanya 1 bulan hingga 24 November.

"Ini serius, masyarakat menunggu," kata anggota MKMK, Bintang R Saragih. **(bes/js)**

**RI Kutuk...**

**Dari Halaman 1**

gencatan senjata untuk segera diupayakan serta pengiriman bantuan didorong dan dipercepat pengirimannya ke Gaza.

"Indonesia juga melakukan komunikasi dengan banyak pihak, untuk mengupayakan penyelesaian masalah," kata dia.

Lebih dari tiga pekan setelah perang pecah di Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu, ribuan orang telah menjadi korban perang. Menurut laporan terbaru, korban tewas di Gaza mencapai 8.005 orang dan melukai lebih dari 20.200 orang lainnya.

Meski Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menghasilkan rekomendasi resolusi terkait gencatan senjata, namun Israel justru memperluas serangannya di wilayah itu.

Dikutip Reuters, terlepas dari tekanan internasional untuk gencatan senjata, Israel kekeh melancarkan serangan udara dan artileri ke Jalur Gaza pada Senin pagi.

Serangan udara Israel menghantam daerah dekat Rumah Sakit Shifa dan Al-Quds di Gaza, dua rumah sakit terbesar di wilayah itu. Baku tembak antara milisi Hamas dan tentara Israel juga dilaporkan berlangsung semakin sengit di timur Khan Younis, selatan Gaza. **(cnni/js)**

**Dinasti Politik...**

**Dari Halaman 1**

"Puncak pengkhianatan!" ujar Amien di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Amien lalu menjelaskan dinasti politik yang tengah dibangun Jokowi --kader PDIP pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri yang belakangan retak hubungan. Jokowi memulai dengan rencana menjadikan menantunya yang duduk sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution --suami Kahiyang Ayu--menjadi Gubernur Sumatera Utara, dan kini masih berproses.

Setelah itu, menjadikan anak bungsunya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan sudah jadi. Kemudian, puncaknya, memberikan karpet merah untuk putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres pendamping capres Prabowo Subianto, dan sudah mendaftar ke KPU --dan ditengarai menjadi sumber keretakan dengan PDIP, karena menjadi pesaing bagi capres kadernya: Ganjar Pranowo.

"(Jokowi) mementingkan dirinya dan keluarganya di atas kepentingan bangsa," bebemnya.

**RAKYAT TAK SENANG**

Lokomotif gerakan reformasi 1998, dan mantan Ketua MPR ini memastikan, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak senang dengan langkah politik Jokowi.

Ketidaksenangan --yang dapat melahirkan penentanan atau perlawanan-- ini, dinilainya sebagai harapan untuk melahirkan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan.

"Jadi masih ada harapan. Demokrasi kita masih (bisa) bangkit kembali," pungkasnya, tanpa menjelaskan lebih jauh dan rinci. **(mi/cp/js)**



## Makan Bersama

**Dari Halaman 1**

menghindari sekat atau jurang yang memperburuk keadaan.

Senin, kemaren, Presiden Jokowi mengundang para calon Presiden. Ada Anies Rasyid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada juga Ganjar. Mereka hadir di istana menikmati makan siang bersama dengan penuh keakraban, seakan tidak ada beban dalam pertarungan perebutan kursi nomor wahid 2024 mendatang. Sebentar lagi mereka akan berkampanye ke tengah-tengah masyarakat.

Kita tidak mendapatkan isu pokok pembicaraan Presiden Jokowi dengan para Calon Presiden RI tersebut. Para wartawan hanya diberi kesempatan 10 menit mengambil sesi foto, bukan meliput berita. Apakah nantinya isi pembicaraan itu bisa bocor ke luar?

Tergantung kewiraan wartawan mengorek informasinya kepada para calon Presiden tersebut.

Jika Presiden yang mengundang boleh Presiden yang punya kepentingan pesan yang menjadi harapannya. Boleh juga berdiskusi untuk menjadi harapan bersama ketika nanti terpilih menjadi orang yang berkuasa di Republik ini. Tentu saja makan bersama itu merupakan pembicaraan sangat penting.

Terlepas apa isi pesan yang disampaikan dalam pertemuan makan bersama itu, Islam memang sangat menganjurkan melakukan makan bersama.

Dari Wahsyi bin Harb dari bapaknya dari kakeknya, "Sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengadu, wahai Rasulullah sesungguhnya kami makan namun tidak merasa kenyang. Nabi bersabda, "Mungkin kalian makan sendiri-sendiri?" "Betul", kata para sahabat. Nabi lantas bersabda, "Makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah sebelumnya tentu makanan tersebut akan diberkahi." (HR Abu Dawud no. 3764 dan dinilai shahih oleh al-Albani).

Hadis ini memang menekankan perlunya makan bersama tetapi jangan lupa menyebut nama Allah sehingga bisa memperoleh berkah atas apa yang kita makan. Tetapi ada juga yang memahami makan bersama berarti makan satu piring, lalu makan secara bersama seperti yang sering dipraktikkan oleh jamaah tabligh, sehingga memperoleh berkah kenyang.

Makan satu orang itu cukup untuk dua orang. Makanan dua orang itu cukup untuk empat orang. Makanan empat orang itu cukup untuk delapan orang." (HR Muslim no 2059).

Hadits ini menunjukkan bahwa makanan satu orang itu mencukupi untuk dua orang dan seterusnya adalah disebabkan keberkahan yang ada dalam makan bersama. Semakin banyak jumlah orang yang turut makan maka keberkahan semakin bertambah."

Pada jamuan makan bersama di istana masing-masing mereka menggunakan piringnya sendiri-sendiri. Memang lazimnya di negeri ini seperti itu, karena jika sepiring bersama dipandang kurang etis. Terlepas dari itu semua yang penting haruslah mengucapkan doa makan sebagaimana dianjurkan.

Kita hanya berharap jamuan makan bersama itu selain memberi berkah bagi mereka, tetapi juga bisa memberi berkah bagi rakyat Indonesia jika nanti salah seorang dari mereka terpilih selaku Presiden RI. (\*)